

GLOBALISASI EKONOMI DAN TEKANAN IDEOLOGI EKONOMI LIBERAL

Edy Suandi Hamid*)

Berbagai aksi yang menolak praktik globalisasi ekonomi dewasa ini kerap kali muncul di media massa di tanah air. Penolakan tersebut terkait dengan banyak bidang atau aspek, seperti pertanian, industri, lingkungan, perburuhan, ataupun juga berkaitan dengan isu privatisasi BUMN. Hampir setiap hari kita menjumpai berita-berita di media massa yang menggambarkan dampak globalisasi ekonomi yang prosesnya semakin jauh dan merasuk perekonomian nasional. Globalisasi, menurut penelitian Rice dan Sulaiman (2004: 80-90) telah menimbulkan berbagai kesulitan bagi ekonomi Indonesia, di samping juga menciptakan beberapa peluang. Sedang Mubyarto (2002: 1-4) menilai globalisasi telah menjadi kekuatan serakah dari sistem kapitalisme-liberalisme yang telah menyengsarakan kehidupan Bangsa Indonesia, sehingga harus dilawan dengan kekuatan ekonomi-politik nasional yang didasarkan pada ekonomi rakyat.

Tanggapan sebagian masyarakat di tanah air terhadap proses globalisasi ekonomi yang sedang berjalan, kondisinya hampir sama dengan kondisi global: ada yang bisa menerima, di samping banyak pula yang menentang. Pandangan yang menentang menganggap proses globalisasi yang berlangsung saat ini merupakan hasil rekayasa dari korporasi internasional dan negara-negara maju, di samping juga pandangan yang menilainya sebagai pemaksaan ideologi ekonomi yang tidak sejalan dengan ideologi ekonomi nasional. Kampanye ideologi ini disebarakan melalui media global milik korporasi-korporasi internasional bidang media yang berpusat di negara maju (Hartiningih, 2005: 33).

*) Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, Guru Besar Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.

Mengarah ke liberalisme

Dengan ideologi ekonomi liberal tersebut, Bangsa Indonesia dipaksa menyesuaikan dengan sesuatu yang berbeda dengan pandangan hidupnya. Melalui berbagai payung "kesepakatan" (*agreements*) yang dinaungi WTO (*World Trade Organization*), Bank Dunia, ataupun IMF (*International Monetary Fund*), perekonomian nasional semakin digiring ke arah persaingan bebas, keterbukaan ekonomi yang luas, pengurangan campur tangan pemerintah dalam ekonomi, maupun penjualan aset-aset BUMN kepada investor asing lewat apa yang dikenal dengan privatisasi ataupun divestasi. Lewat saran dari IMF pula kita melakukan penyehatan perbankan dengan biaya sampai Rp 650 triliun, melalui dana rekaptalisasi perbankan yang kini setiap tahun menjadi beban rakyat yang tercermin pada APBN kita.

Dengan kebijakan yang "dituntun" lembaga-lembaga tersebut, berbagai subsidi seolah "diharamkan", harga domestik harus tidak jauh berbeda dengan harga di pasar dunia. Akibatnya, berbagai subsidi yang banyak dinikmati lapisan masyarakat bawah, harus dihapuskan. Harga Bahan Bakar Minyak, misalnya, harus disesuaikan dengan harga di luar negeri, walaupun disadari akibatnya telah memero-

merosotkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Salah satu tekanan lewat proses globalisasi yang "sukses" dapat dilihat dalam sistem nilai tukar kita. Indonesia yang sebelumnya menganut sistem nilai tukar mengambang (*managed floating exchange rate system*) berubah ke sistem nilai tukar bebas (*freely floating exchange rate system*) pada bulan Agustus 1997. Sejak diberlakukannya sistem tersebut, nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi yang tinggi disertai volatilitas yang tinggi pula. Sebagian pemilik dana diajak menjadi "hobi" berspekulasi dengan sistem tersebut, sehingga tidak mengherankan kemudian banyak rumah tangga yang memegang mata uang asing, dan menjualnya pada saat rupiah terdepresiasi. Studi *Tuwo* dan *Hidayat* (2003: 33) menyimpulkan, penerapan sistem nilai tukar bebas ini belum memberikan kinerja yang signifikan terhadap penyembuhan perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator volatilitas nilai tukar, volatilitas cadangan devisa, volatilitas suku bunga, dan volatilitas pasar uang yang masih tinggi.

Globalisasi membuat ekonomi kita yang masih rentan menjadi mudah dibuat bergejolak sebagai akibat bebasnya lalu lintas mo-

dal, terutama yang terkait investasi tidak langsung di pasar modal. Pemain di pasar modal sangat berorientasi jangka pendek. Sedikit saja gejolak yang timbul, bisa mengalirkan dana triliunan dalam sekejap. Arus keluar modal terjadi dengan cepat seperti tahun 1997-1998 ketika krisis ekonomi melanda tanah air. Kondisi ekonomi yang sudah rapuh semakin dibuat terpuruk dengan banyaknya pemilik modal melepas sahamnya di bursa-bursa tanah air. Konsekuensi dari semua itu, kita memerlukan cadangan devisa yang besar agar dapat mengatasi dampak gejolak pada neraca modal. Padahal untuk meningkatkan cadangan devisa tidak mudah sebagai akibat masih rendahnya efisiensi dan daya saing produk dalam negeri dan ketatnya persaingan di pasar global.

Tekanan melalui *Letter of Intents* dengan IMF untuk melaksanakan privatisasi telah membuat BUMN yang memiliki reputasi dunia dan sangat *profitable* harus dilepas. Misalnya terjadi pada *PT Indosat*, salah satu BUMN yang tidak saja memberikan keuntungan tinggi, melainkan juga membanggakan lewat kepemilikan atas satelit-satelit telekomunikasinya. Padahal, sebagaimana dikemukakan *Stiglitz* (2002: xi), privatisasi seharusnya arahnya dapat membuat perusa-

haan lebih efisien dan menjual harga lebih murah pada konsumennya". Jadi bukan sekedar untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah atas harus "mengejar setoran" untuk mengatasi kesulitan fiskal. Pengamatan pada proses privatisasi selama ini menunjukkan hal yang jauh dari tujuan yang seharusnya terjadi, yakni untuk menyelamatkan perusahaan, meningkatkan efisiensi, dan melindungi konsumen yang arahnya untuk sebesar-besarnya mendukung kemakmuran rakyat.

Evolusi Globalisasi Ekonomi

Dari perspektif sejarah, upaya menyatukan ekonomi global tersebut sudah berlangsung sejak lama a.M enurut *Elwood* (2001:12-13) globalisasi ekonomi sebagai suatu kata atau istilah memang merupakan terminologi yang baru, namun sebagai aktivitas mengglobalnya ekonomi itu sudah berlangsung sejak masa kolonialisme Eropa lima abad yang lalu. Globalisasi ekonomi waktu itu terjadi untuk mendapatkan kekayaan di belahan dunia yang sebelumnya tidak terjangkau. *Cristobal Colon*, yang kemudian dikenal dengan nama *Christopher Columbus*, dengan dukungan dana dari Raja dan Ratu Spanyol berlayar mengarungi lautan untuk mem-

nuhi menuju wilayah Asia yang diberitakan berlimpah dengan kekayaan alam dan emasnya.¹ Upaya mencari wilayah baru untuk memperoleh kekayaan bagi negara yang relatif kaya semacam ini terus berlanjut. Dalam catatan sejarah yang terkait dengan globalisasi lainnya, dapat dikemukakan upaya yang dilakukan jurubicara terkenal Kerajaan Inggris tahun 1890-an, *Cecil Rhodes*, yang menyatakan perlunya negara mendapatkan tanah yang baru, karena dengan lahan (jajahan) yang baru tersebut bisa menguntungkan negerinya:

"... from which we can easily obtain raw materials and at the same time exploit the cheap slave labor that is available from natives of the colonies. The colonies (will) also provide a dumping ground for the surplus goods produced in our factories" (*Khor dalam Elwood, 2001: 13*).

Pandangan-pandangan demikian merupakan pandangan kaum merkantilis pada abad ke-17 dan ke-18, yang menjadikan globalisasi ekonomi guna memperoleh surplus perdagangan dalam rangka memperkuat negaranya. Sebagaimana ditulis oleh *Alexander Hamilton*, tokoh

merkantilis dari Amerika Serikat pada tahun 1791 berkaitan dengan kebijakan proteksi AS di bidang industri: *"Not only the wealth but the independence and security of a country apperas to be materialially connected to the prosperity of manufactures"* (*Gilpin, 2002: 92*).

Jadi upaya globalisasi era kolonial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan negara yang sudah lebih dulu maju dengan mengeksploitasi negara atau daerah yang masih terbelakang. Memang sejak era tahun 1860-an dan 1870-an perdagangan dunia mengalami puncaknya (*boom-ing*) dan dianggap sebagai '*golden era*' perdagangan dunia walaupun itu hanya bertumpu pada hubungan yang lebih menguntungkan negara-negara Eropa. Kekayaan dari negara-negara terjajah mengalir ke Prancis, Inggris, Belanda, dan Spanyol, dan sebagian dari kekayaan itu kembali diinvestasikan ke negara jajahan dalam bentuk jalan kereta api, jalan raya, pelabuhan, bendungan irigasi, dan kota-kota. Sebagai gambaran, transfer modal dari negara Utara (kaya) ke negara Selatan (miskin) tahun 1890-an secara aktual jauh lebih besar dibandingkan akhir tahun

1 Walaupun ia tidak berhasil menemukan daerah impiannya itu, namun pendarataannya di San Salvador yang dikiranya India menandai suatu yang sangat penting dan memulai masa kolonialisme Eropa dan terjadinya integrasi ekonomi antar-negara

1990-an (*Elwood*, 2001: 14).

Globalisasi ekonomi yang sudah berakar sejak berabad-abad tersebut terus berevolusi. Titik yang signifikan terjadi tahun 1947 saat mulai berlakunya dan dilembagakannya *Perjanjian Umum tentang Tariff dan Perdagangan* atau GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Komitmen yang mengarah pada globalisasi perdagangan dunia yang dimotori oleh Amerika Serikat tersebut pertama kali hanya diikuti oleh 23 negara. Evolusi globalisasi ekonomi ini kemudian berkembang sangat cepat sejak akhir 1980-an. Melalui perundingan panjang yang dilakukan GATT selama 8 tahun, yang dikenal dengan *Putaran Uruguay* pada tahun 1995 berhasil memutuskan membentuk *World Trade Organization* (WTO). Keanggotaan WTO ini terus berkembang dan sampai Februari 2005 mencapai 148 negara, dengan bidang cakupan yang lebih luas, yakni menyangkut liberalisasi lalulintas barang dan jasa (GATS).

Secara garis besar, evolusi atau kecenderungan globalisasi ini dapat dikategorisasikan menjadi tiga tahap (*Djiwandono*, 2004: 3), yaitu: (a) gelombang globalisasi pertama antara tahun 1870-1914. Periode ini ditandai perkembangan dalam peralatan transportasi dan penurunan rin-

tangan perdagangan sehingga meningkatkan perdagangan internasional dan investasi oleh negara-negara Amerika Utara dan Eropa ke berbagai kawasan; (b) gelombang globalisasi kedua antara tahun 1950-1980, yang ditandai oleh integrasi negara-negara kaya, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Laju pertumbuhan negara berkembang juga meningkat, namun umumnya jurang perbedaan antara negara maju dengan negara berkembang semakin besar; (c) gelombang globalisasi mutakhir mulai tahun 1980-sekarang, yang ditandai oleh kemajuan teknologi dalam transportasi, komunikasi, perbaikan sejumlah negara-negara berkembang untuk membuka diri terhadap perdagangan luar negeri dan investasinya (*Washington Concensus*). Dapat dikatakan sejak akhir 1980-an globalisasi yang sebelumnya berjalan lambat, berubah dari proses *evolusi* menjadi *revolusi*.

Konsekuensi bagi negara berkembang

Liberalisasi dalam bidang perdagangan menjadi ujung tombak globalisasi ekonomi ini. Sepanjang yang dapat dilihat saat ini, perkembangan perdagangan dunia memang sangat pesat sejak GATT tersebut. Namun se-

cara absolut, perkembangan sangat cepat selama dua dasawarsa terakhir ini. Mulai dilaksanakannya keputusan-keputusan dari *Putaran Uruguay* semakin mempercepat perdagangan dunia tersebut. Globalisasi, yang dalam perdagangan internasional menjadi liberalisasi perdagangan, telah menghapuskan berbagai hambatan perdagangan secara signifikan, baik itu hambatan yang berwujud tariff bea masuk maupun hambatan-hambatan bukan tariff, seperti pelarangan impor, kuota, lisensi impor, dan sebagainya. Dimasukkannya sektor jasa dalam liberalisasi ekonomi dunia itu, sebagai implementasi GATS (*General Agreement on Trade and Services*), semakin menyudutkan posisi banyak negara berkembang yang umumnya sangat lemah dalam sektor jasa, termasuk Indonesia.

Adanya kesepakatan GATS sangat *significant* dan menguntungkan bagi negara maju, terutama yang sektor jasanya sudah mumpuni, dan berdampak sebaliknya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kita tidak lagi

bisa menutup diri atas kantor konsultan dagang asing, konsultan hukum ataupun kantor akuntansi, bahkan arahnya juga pada lembaga pendidikan asing. Lewat GATS pula kini "pengetahuan" akan dianggap sebagai suatu komoditi sehingga pendirian lembaga pendidikan juga tunduk pada ketentuan WTO. Hal ini sedang "digugat" oleh pimpinan perguruan tinggi di tanah air.² Para ahli asing pun akan lebih banyak memberikan *training-training* untuk pihak-pihak yang membutuhkan di Indonesia. Dengan kata lain, "lalulintas" antarnegara bagi manusia yang masuk dalam kategori tenaga profesional semakin deras, termasuk ke negeri kita. Bagi Indonesia hal itu sangat mengkhawatirkan karena sebelumnya banyak restriksi dalam lalulintas jasa internasional ini. Misalnya adanya hambatan dalam dalam lalulintas tenaga profesi untuk bekerja di negara lain, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; restriksi dalam pembukaan kantor cabang; adanya pembatasan dalam pengakuan tenaga profesional;

2 UGM bekerja sama dengan Forum Rektor Indonesia yang beranggotakan 2300 perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah menginisiasi kerja sama antar universitas (nasional dan internasional) untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan kembali rencana WTO untuk memasukkan "pengetahuan" sebagai satu kategori "komoditi" ke dalam GATS yang akan ditandatangani Mei 2005 ini. Langkah ini akan diperluas melalui konsorsium universitas-universitas di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, India, dan Jaringan Universitas ASEAN (Sofian Effendi, 2005: 27-28).

penerapan standar-standar yang berbeda; dan sebagainya.

Dengan persaingan yang lebih bebas, terlebih tanpa antipasi yang memadai, defisit perdagangan sektor jasa Indonesia berpotensi semakin besar. Ini mengingat dalam GATS Indonesia telah memberikan cukup banyak komitmen, mencakup lima sektor yang melingkupi 68 kegiatan/transaksi. Memang komitmen terhadap perdagangan jasa yang telah diberikan tersebut tidaklah sepenuhnya liberal. Berbagai pembatasan masih bisa diberlakukan, seperti kewajiban untuk patungan pada sektor jasa tertentu, pembatasan saham, batasan masa tinggal, kuota dan sebagainya. Namun, dengan kondisi penuh restriksi saja sektor jasa nasional sudah kesulitan, maka pengenduran restriksi ini membuat posisi sektor jasa semakin bertambah sulit.

Secara makro-global dapat dikatakan peningkatan perdagangan bebas tersebut merefleksikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Namun kesimpulan tersebut menjadi dipertanyakan manakala dilihat *siapa* atau *negara-negara mana* yang perekonomiannya mengalami peningkatan pesat tersebut. Data pada *lampiran* menunjukkan ekspansi perdagangan terutama terjadi di negara-negara maju. Konsentrasi perdagang-

an dunia masih berpusat di negara-negara Utara seperti Amerika Utara dan Eropa Barat, sementara untuk negara Asia hanya terkonsentrasi pada Jepang dan Cina. Negara-negara yang meningkat pesat perdagangannya tersebut, kecuali Cina yang memiliki karakteristik perdagangan khusus, adalah negara-negara yang secara historis sudah berabad-abad melaksanakan perdagangan bebas. Liberalisasi perdagangan, dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingannya, sudah merupakan hal yang biasa. Negara-negara tersebut tidak memerlukan transisi untuk melaksanakan perdagangan bebas. Ketika "gerbang" perdagangan bebas dunia dibuka, aliran ekspor mereka dengan mudah masuk ke negara-negara sedang berkembang. Nilai perdagangan internasionalnya meningkat secara berarti. Keadaan berbeda terjadi di negara sedang berkembang. Proteksi terhadap pasar domestik masih menjadi karakteristik utamanya. Hal ini terjadi karena tingkat industrialisasi dan daya saing relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Dalam kondisi demikian, tidak mengherankan jika negara-negara berkembang sulit bersaing, khususnya produk-produk sejenis dan hasil industri. Oleh karena itu, liberalisasi perdagangan yang meru-

pakan turunan dari globalisasi ekonomi, lebih banyak menimbulkan kerugian bagi negara-negara berkembang. Nilai perdagangannya, walaupun meningkat, tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara pelopor liberalisasi ekonomi tersebut.

Berdasarkan kenyataan demikian *Stiglitz* (2002: ix-x) meminta agar pelaksanaan globalisasi, termasuk berbagai *agreement* mengenai perdagangan dikaji ulang dan dipertimbangkan kembali secara radikal.

Khor (2003:3) melukiskan dengan cermat pandangannya tentang konsekuensi perdagangan bebas sebagai berikut:

"Pemikiran bahwa semua pihak akan diuntungkan dan tidak akan ada yang dirugikan dalam perdagangan bebas terbukti sangat menyederhanakan masalah. Sejumlah negara memperoleh keuntungan lebih banyak dibanding yang lain; dan beberapa diantaranya (terutama negara-negara miskin) tidak memperoleh apapun, kecuali menderita kerugian yang sedemikian besar bagi perekonomian mereka. Hanya sedikit negara yang menikmati pertumbuhan sedang atau tinggi dalam dua dekade terakhir, sementara sejumlah besar negara mengalami penurunan standar hidup...."

Pandangan lain yang tidak

kalah keras dalam menolak *pola* perdagangan dunia yang dikomandani WTO ini juga datang dari *Walden Bello* (2004) dalam bukunya yang judulnya sangat provokatif: "De-globalisasi" (*de-globalization*). Bello melihat sudah terjadi kekacauan dalam sistem multilateral. WTO dinilai sudah menjadi perpanjangan tangan perusahaan-perusahaan transnasional (TNC) yang menjadikannya sebagai monopoli dunia. Ini misalnya dapat dilihat dilegitimasikannya perjanjian yang terkait dengan hak milik intelektual (*TRIPS= Trade Related with Intellectual Property Rights*) yang mengukuhkan pengambilalihan inovasi teknologi oleh perusahaan transnasional seperti Intel, Microsoft, dan Monsanto. Secara khusus dikemukakannya bahwa "ekspansi dari perdagangan bebas dan ekspansi kekuasaan dan yurisdiksi WTO, yang saat ini merupakan instrumen multilateral dari perusahaan global yang sangat kuat, merupakan ancaman yang mematikan terhadap pembangunan, keadilan sosial dan persamaan hak, dan lingkungan" (154).

Tentu saja globalisasi ekonomi juga memberikan manfaat bagi penduduk dunia, seperti meningkatnya output dunia, dan semakin banyaknya tawaran komoditi yang berkualitas dengan

harga yang relatif murah. Perkembangan peradaban manusia juga mencapai titik yang tidak terbayangkan selama ini. Namun, menurut *Gelinas* (sebagaimana dikutip *Sofian Effendi*, 2004: 13) kemajuan tersebut diiringi pula dengan tragedi kemanusiaan seperti: (1) 4 sampai 6 miliar penduduk berada di 127 negara terbelakang hidup dalam kondisi kemiskinan yang berat; (2) 49 negara paling tebelakang secara teknologis mengalami kebangkrutan; (3) pendapatan per kapita per tahun dari 100 negara di Dunia Ketiga mengalami penurunan dari keadaan 10, 15, 20, dan bahkan 30 tahun yang lalu; (4) 2,8 miliar penduduk di Negara-negara Dunia Ketiga hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari; (5) 1,3 miliar penduduk di negara-negara yang sama bahkan hidup dengan tingkat konsumsi kurang dari 1 dollar AS; (6) 2,6 miliar penduduk dunia tidak memiliki infrastruktur yang memadai; dan 6) 1,4 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih.

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang terjadi saat ini adalah suatu *grand design* dari negara-negara kaya bersama kapitalisme global, yang menggunakan kekuatannya sendiri atau melalui lembaga-lembaga

ekonomi-keuangan global yang berada di bawah pengaruhnya. Dengan bahasa yang "keras" *Swasono* (2005: 1) melukiskan globalisasi yang terjadi saat ini sebagai "faham liberalisme baru untuk menjadi topengnya pasar bebas, yang justru mengabaikan cita-cita globalisme ramah untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan mondial". Nada yang sama juga dikemukakan *Mubyarto* (2005: 6) yang secara tegas menolak praktik globalisasi. "... karena dalam sifatnya yang ada sekarang, yang serakah dan imperialistik, sangat merugikan perekonomian negara-negara berkembang seperti Indonesia".

Kekhawatiran nafsu imperialistik yang serakah sebenarnya sudah muncul sejak lama. *Bung Karno* dalam Pidato Pembelaannya di depan Pengadilan (*landraat*) Bandung Agustus 1930 menyatakan:

"Sebagai yang tadi kami katakan, imperialisme bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan negeri dan bangsa lain, tapi imperialisme bisa juga hanya nafsu atau sistem mempengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Ia tidak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapal perang, tak usah berupa 'perluasan negeri daerah dengan kekuasaan senjata' seperti yang diartikan oleh *van Kol*,

tetapi bisa juga berjalan hanya dengan 'putar lidah' atau cara 'halus-halusan saja', bisa juga dengan cara *penetration pacifique* (Soekarno, dalam Mubyarto, 2004: 17)

Dapat melihat bagaimana peran besar negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia dalam upaya pembentukan APEC akhir 1980-an dan kemudian menggiringnya kepada liberalisasi ekonomi yang dideklarasikan dalam *APEC Economic Leaders Meeting* atau dikenal juga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC ke-2 di Bogor tahun 1994. KTT itu pula menjadi *turning point* bagi sikap Indonesia dalam hubungan ekonomi internasionalnya, karena secara tanpa segan-segan Indonesia "mengimpor" berbagai kebijakan yang sebelumnya dianggap masih "tabu", yang terkait dengan liberalisasi perdagangan dan investasi. Secara mengejutkan Presiden Soeharto (waktu itu) mengatakan dengan ucapan yang sangat terkenal yang substansinya adalah: "*suka atau tidak suka, siap atau tidak siap kita harus menerima dan menghadapi perdagangan bebas dunia*", yang menggambarkan bahwa Indonesia sudah membuka diri dan meliberalkan perekonomiannya. Hal itu dilakukan karena terpesona janji-janji globalisasi ekonomi yang akan membawa pada pe-

ningkatan kesejahteraan dunia serta tekanan-tekanan melalui berbagai forum global oleh negara maju dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti Bank Dunia, WTO, dan IMF. Ketiga lembaga tersebut, yang oleh *Richard Peet* disebut sebagai "*Tritunggal Brengsek*" (*Unholy Trinity*) yang sangat berperan dalam mempercepat proses globalisasi ekonomi.

Untuk mengintegrasikan perekonomian global itu, dibuatlah aturan yang seragam, norma-norma yang standar, hukum ekonomi yang baku, dan berbagai ketentuan umum yang terkait dengan hubungan ekonomi internasional. Berbagai ketentuan itu umumnya diadopsi dari apa yang sudah berlaku dan menjadi kebiasaan di negara-negara industri yang berbasis ideologi ekonomi liberal-kapitalis. Melalui lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional, disusunlah berbagai kesepakatan global yang tidak selalu cocok dan menguntungkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai benturan yang tidak jarang menimbulkan kegagalan dalam forum-forum dan dialog internasional seperti yang terjadi di *Cancun*, Meksiko, pada bulan September 2003. Hal inilah kemudian melahirkan kecukiran terhadap adanya kepen-

tingan yang bercokol (*vested interest*) dan pemaksaan kehendak untuk mewujudkan globalisasi ekonomi. Arah globalisasi ekonomi ternyata tidak banyak berubah sejak abad lalu menjadi alat kepentingan negara-negara adikuasa ekonomi untuk memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari menyatunya ekonomi dunia tersebut.

Dengan kepentingan yang demikian, maka tidak mengherankan kalau kebijakan yang diterapkan di negara-negara maju tersebut – demi melindungi kepentingan nasionalnya – acapkali bertentangan dengan prinsip globalisasi yang dikembangkannya.³ Misalnya, sikap Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat yang sangat kokoh melindungi para petani dan peternaknya dengan kebijakan subsidi yang sangat besar. Adalah tidak aneh pula negara-negara industri yang selalu menyerukan privatisasi dan pengurangan campur tangan pemerintah dalam perekonomian, ternyata statistiknya menunjukkan hal yang bertolak belakang. Porsi pengeluaran pemerintah terhadap PDB di negara-negara industri justru semakin meningkat dari waktu ke waktu. Mengutip

studi *Tanzi dan Schuknecht* (1995), *Rodrik* (1997: 50) menunjukkan rata-rata pengeluaran pemerintah di negara industri meningkat dari 20,7% dari PDB pada tahun 1937, menjadi 28,5% tahun 1960, dan meningkat lagi menjadi 42,6% tahun 1980 dan 47,2% tahun 1994 (*Lampiran*). Hal yang sebaliknya terjadi dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang porsi anggaran pemerintahnya cenderung semakin menurun terhadap GDP-nya (*Baswir*, 2005a). Data ini dapat ditafsirkan sebagai proses sistematis untuk merombak struktur perekonomian negara-negara miskin, dalam bentuk pengkerdilan peran negara dan peningkatan peranan pasar sehingga memudahkan pengintegrasian serta pengendalian perekonomian negara-negara miskin tersebut dibawah penguasaan pemodal negara-negara kaya (*Baswir*, 2005b: 15).

Penutup: Mengantisipasi Globalisasi Ekonomi

Setelah diuraikan tentang berbagai pandangan yang kini mulai mempertanyakan arah globalisasi ekonomi, maka muncul pertanyaan pragmatis tentang ba-

3 AS bisa menghalalkan segala bentuk proteksi untuk kepentingan nasionalnya. Diskusi ini sudah muncul sejak 1950-an. Kajian tentang ini misalnya dapat dibaca dalam tulisan *Steven Enke* (1957) berjudul "*Protection in the Name of Security*" dalam *Readings in Current Economics* (*Grossman et al*, 1961).

gaimana kita menyikapi globalisasi ekonomi ini. Haruskah kita larut dalam arus yang dikendalikan kapitalisme global dan negara-negara tertentu untuk menentukan ke arah mana perekonomian akan dibawa? Jika tidak, langkah apa yang perlu dilakukan?

Jawabannya sangat jelas, kita tidak seharusnya menerima begitu saja praktik globalisasi ekonomi yang melahirkan hegemoni negara maju atas negara berkembang, dan hegemoni usaha besar atas usaha kecil. Pandangan ini tidak perlu diartikan bahwa penulis menolak gagasan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi bisa disetujui sepanjang itu diartikan sebagai keterbukaan ekonomi untuk melaksanakan transaksi ekonomi secara adil dan tidak merugikan kepentingan nasional. Yang perlu ditolak adalah globalisasi dalam proses dan wajahnya seperti sekarang, suatu praktik yang dipaksakan dengan ideologi tunggal untuk kepentingan negara dan golongan yang kuat secara ekonomi, termasuk korporasi global.

Namun demikian kita juga perlu bersikap realistis, dan tidak menafikan proses globalisasi tersebut yang sedang berjalan. Adalah mustahil, walaupun kita menolak proses ini, untuk terus membangun dengan mengisola-

si diri dari interaksi ekonomi global. Oleh karena itu, proses yang terjadi perlu disikapi secara realistis dengan terus-menerus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional untuk bekerja sama dan bersaing secara jujur dan adil dengan negara lainnya. Ini penting untuk mengamankan neraca pembayaran kita, terutama transaksi berjalan (*current account*) yang saat ini masih surplus namun berpotensi sangat besar untuk berbalik menjadi defisit (lihat misalnya Soesastro, 2003). Namun demikian pemerintah pun harus mempunyai sikap tegas dan menolak tekanan dan pemaksaan kehendak yang dilakukan melalui forum-forum lembaga ekonomi dan keuangan internasional apabila hal itu tidak adil dan merugikan kepentingan nasional. Keharusan membuka pasar secara semena-mena tanpa melihat kemampuan produsen dalam negeri, misalnya, merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima. Untuk itu, delegasi Indonesia di berbagai forum internasional harus mempunyai sikap tegas untuk menghasilkan rumusan-rumusan kerja sama ekonomi global yang adil dan tidak merugikan kepentingan nasional. Keharusan membuka pasar secara semena-mena tanpa melihat kemampuan produsen dalam negeri, misalnya, merupakan sesuatu yang

tidak bisa diterima.

Berdasarkan itu pula, perlu dicermati kecenderungan globalisasi ekonomi yang terjadi dewasa ini. Praktik globalisasi ekonomi menampakkan diri sebagai "liberalisasi yang dipaksakan", sebuah bentuk neoliberalisme. Dalam bentuknya yang demikian, globalisasi menjadi alat bagi negara yang kuat secara ekonomi untuk memaksakan *ideologi* ekonominya kepada negara-negara lainnya. Dengan proses globalisasi seperti itu, dengan memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi dunia yang dirancang mendukung kebijakannya, maka keuntungan terus mengalir ke negara-negara maju. Dalam banyak kasus memang bisa saja dijumpai hubungan ekonomi yang menghasilkan situasi sama-sama untung, "*gain-gain situation*". Hanya saja keuntungan terbesar tetap saja dinikmati negara-negara industri yang sudah terbiasa dengan praktik persaingan bebas dan pola-pola liberal dalam perekonomiannya sebagai derivasi dari ideologi dan falsafah hidupnya. Globalisasi ekonomi penuh dengan muatan ideologis liberal-

kapitalis,⁴ dan dalam wajahnya yang sekarang merupakan derivasi dari ideologi tersebut. Globalisasi yang demikianlah yang perlu ditolak. Menjadi sangat naif jika kita berbicara mengenai globalisasi yang sarat dengan muatan ideologis tersebut melupakannya dari ideologi bangsa kita, ideologi *Pancasila*. Oleh karena itu, kita perlu melihat praktik globalisasi ekonomi ini dari sudut pandang ideologi bangsa.

Sebagai bangsa yang berideologi Pancasila maka seyogianya pula bagi kita dalam praktik-praktik ekonomi keseharian didasarkan pada norma-norma yang terkandung dalam falsafah bangsa tersebut. Bagaimana menerapkan perilaku ekonomi kita yang berketuhanan, manusiawi, nasionalistik, kerakyatan, dan berkeadilan sosial. Praktik dan arah globalisasi ekonomi yang sedang berlangsung saat ini sangat jauh dari norma-norma ideologis Bangsa Indonesia. Adalah tidak manusiawi jika globalisasi ekonomi harus mengorbankan para petani dalam negeri, tempat sebagian besar angkatan kerja kita ditam-

4 Petinggi militer Indonesia biasanya sangat hati-hati dan cermat membuat pernyataan yang terkait dengan isu-siyu besar, terlebih terkait dengan hubungan internasional. Ketika menjadi Kasad Jenderal *Ryamizard Ryacudu* di forum yang diadakan oleh ITB tahun lalu menyatakan praktik "globalisasi yang sedang berjalan merupakan bentuk dari kolonialisme baru"

pung⁵. Atau harus mengakibatkan para buruh kehilangan pekerjaan, harga komoditi strategis ditentukan asing, dan kedaulatan ekonomi bangsa berada di tangan negara lain atau lembaga internasional. Namun hal demikianlah yang terjadi, praktik globalisasi yang dikendalikan tiga institusi dunia yang membawa misi negara maju dan korporasi global.

Tentu menjadi *naif* jika kita sebagai bangsa yang sedang berkembang yang jumlah pengangguran terbuka masih sangat banyak dan kemiskinan yang masih meluas⁶, dengan tingkat daya saing (*competitiveness*) rendah, justru ikut menyokong praktik globalisasi ekonomi yang memberikan kontribusi pada ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi dunia. Oleh karena itu, kita perlu membentengi ekonomi kita dengan suatu sistem ekonomi yang bertumpu pada ideologi bangsa, berdasarkan nilai-nilai yang hidup yang berkembang di bumi pertiwi ini, yakni *Sistem Ekonomi Pancasila* yang sejak lebih dari dua dasawarsa lalu terus disuarakan oleh Prof. Dr. Mubyarto, yang kini

terus menggali, mencari, dan menemukan kebijakan-kebijakan alternatif untuk menyejahterakan rakyat, menanggulangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan ekonomi berdasarkan etika Pancasila melalui wadah *Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP)* Universitas Gadjah Mada⁷.

Tantangan untuk menghadapi praktik globalisasi ekonomi yang serakah ini memang sangat berat bagi Bangsa Indonesia. Sebagai penutup, saya kutip pandangan Almarhum Prof. Mubyarto:

“ Tantangan ini tidak makin bertambah ringan, karena ada kecenderungan berkembangnya semangat individualisme sebagai akibat merebaknya pengaruh paham kapitalisme-liberalisme (atau bahkan neoliberalisme). Dengan munculnya kelompok pengusaha nasional yang menganut paham kapitalisme global, rupanya muncul semangat ‘keserakahan’ baru yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan *ekonomi rakyat*” (Mubyarto, ed., 2005:ix).

5 Saat ini sekitar 46% angkatan kerja bekerja di sektor pertanian.

6 Tahun 2005 ini diperkirakan kemiskinan masih sekitar 38 juta jiwa, pengangguran terbuka mencapai 10,29 juta orang atau 9,89% dari total angkatan kerja, sedang angka *under-employment*) mencapai 40 juta

7 Pernyataan ini merupakan bagian dari misi PUSTEP UGM yang kini dilakukan melalui riset, diskusi, dan publikasi ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison, 2005a, "Peta Masalah dan Kondisi Perekonomian Indonesia" makalah pada *Diskusi Pemberdayaan Ekonomi Umat*, PP 'Aisyiah, Yogyakarta, 2005
- Baswir, 2005b, "Hentikan Imperialisme Globalisasi Secepatnya" dalam *Tabloid Cita-Cita*, Februari 2005, Jakarta.
- Callinicos, Alex, 2003, *An Anti-Capitalist Manifesto*, Polity Press, Cambridge
- Cavanagh, Jon, et.al, 2002, *Alternatives to Economic Globalization*, Berret-Koehler, San Fransisco.
- Djiwandono, Soedradjad J, "Integrasi Pasar Keuangan dan Globalisasi serta Dampaknya terhadap Kebijakan Moneter di Indonesia" Makalah disampaikan dalam *Kuliah Umum di Fakultas Ekonomi UGM*, Yogyakarta
- Effendi, Sofian, 2005: *Revitalisasi Jati Diri Universitas Gadjah Mada Menghadapi Perubahan Global*", *Orasi Ilmiah dalam Peringatan Dies Natalis ke-55 UGM*, Yogyakarta
- Elwood, Wayne, 2001, *No-Non-sense Guide to Globalization*, NewInternational Publications, Oxford
- Gilpin, Robert, 2002, *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century*, Princeton University Press, Princeton and Oxford
- Hamid, Edy Suandi dan Anto, M.B. Hendrie, 2000, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, UII Press, Yogyakarta
- Hamid, Edy Suandi (2004), *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isyu-isyu Ekonomi Politik Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Hartiningsih, Maria, 2005, "Menyilakan Penjajah Masuk Memasuki Pintu Rumah" dalam *Kompas* 20 April 2005, Gramedia, Jakarta
- Maso'ed, Mohammad Mohtar, 2002, "Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi Politik tentang Globalisasi Neo-Liberal", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*, UGM, Yogyakarta
- Mubyarto, 2002, "Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi", dalam *Jurnal Ekonomi Rakyat* (www.ekonomirakyat.org), Th 1 No. 7/2002
- Mubyarto, 2005, "Lima Puluh Tahun Konferensi Asia Afrika: Penjajahan Kembali Ekonomi Indonesia" Makalah dalam *Seminar*

- Internasional Bandung 2005*, UGM, Yogyakarta
- Mubyarto, ed., 2005, *Indonesia Merdeka*, PUSTEP UGM Yogyakarta
- Khor, Martin, 2003, *Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan (Globalization and the South: Some Critical Issues)*, Cindelas, Yogyakarta
- Petras, James dan Henry Veltmeyer, 2001, *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*, Fenwood Publishing, Halifax
- Pieterse, Jan Nederveen, 2001, "Shaping Globalization" dalam Jan Nederveen Pieterse (ed) *Global Futures: Shaping Globalization*, Zed Books, London
- Rice, Rober C dan Idris Sulaiman, 2004, "Globalization and the Indonesian Economy: Unrealized Potential" dalam Davies, Gloria dan Nyland, Chrys, *Globalization in the Asia Region: Impacts and Consequences*, Edward Elgar, Cheltenham, UK
- Rodrik, Dani, 1997, *Has Globalization Gone Too Far?*, Institute for International Economics, Washington DC
- Shipman, Alan, 2002, *The Globalization Myth*, Icon Books LTD, Cambridge
- Singer, Peter, 2002, *One World, The Ethics of Globalization*, Yale University Press, New Haven and London
- Soekarno, 2004, *Indonesia Menggugat* (editor Mubyarto), PUSTEP UGM, Yogyakarta
- Soesastro, Hadi, 2003, "Neraca Pembayaran Indonesia: Adakah Bahaya Mengintip", *Makalah Kongres ISEI 2003*, ISEI, Malang
- Stiglitz, Joseph E., 2002, *Globalization and Its Discontents*, WW Norton Company, New York-London
- Swasono, Sri-Edi, 2005, *Daulat-Rakyat Rakyat desus Daulat-Pasar*, PUSTEP UGM, Yogyakarta
- Tuwo, Lukito dan Hidayat, Yahya, "Opsi Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia" *Makalah Kongres ISEI 2003*, ISEI, Malang
- Wolf, Martin, 2004, *Why Globalization Works*, Yale University Press, New Heaven and London